



# 2024

## RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SOLOK

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia Nya, sehingga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ( Renja ) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari partisipasi dari segenap aparaturnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah - mudahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.

  
Abel 6/02 - 23

Arosuka, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

  
**DENI PRIHATNI, ST. MT**  
NIP. 19710505 199803 1 017



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
<b>I.1. Latar Belakang</b> .....	3
I.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II .....	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) .....	10
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU .....	10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok .....	10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok .....	11
II.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok .....	12
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....	14
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	15
BAB III .....	16
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	16
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	16
III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD .....	17
III.3. Program dan Kegiatan .....	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

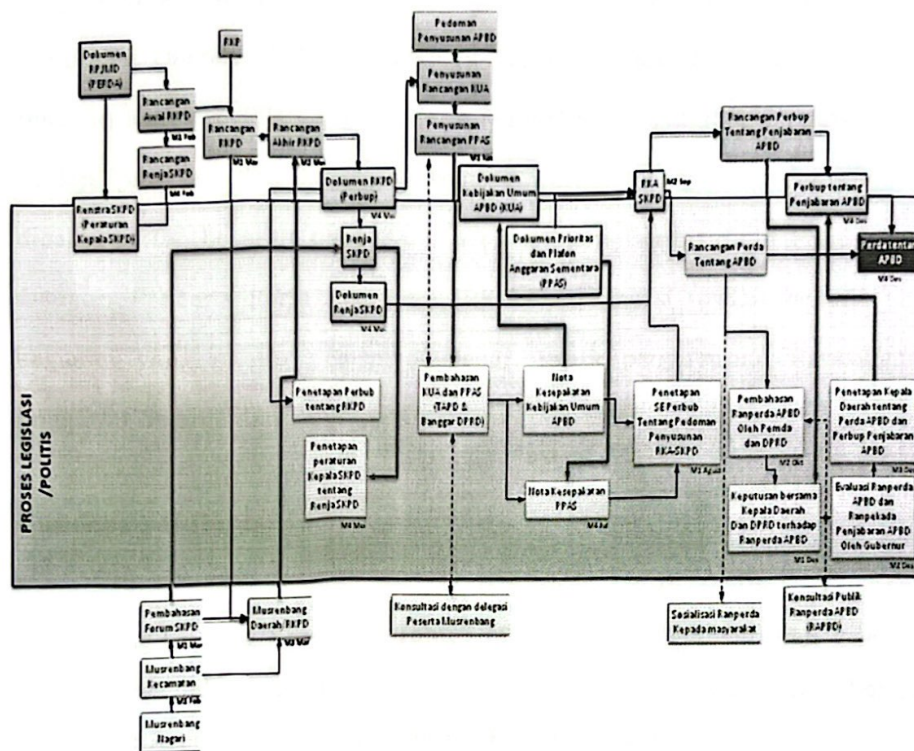
Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan Propinsi dan Nasional/K/L, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan



pembangunan Propinsi dan Nasional/K/L sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok.

Adapun hubungan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Hubungan Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusunlah Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen

yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah finalisasi Rencana Kerja (Renja), akan disusun KUA dan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
  16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52)
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  22. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini dibagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari :

#### **Bab I   Pendahuluan**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu**

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD, Program dan Kegiatan.

**Bab IV Penutup**

Berisikan kesimpulan serta rencana tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2024.



## BAB II

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok**

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu (2022) ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Perkiraan tingkat pencapaian realisasi target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan tahun berjalan (2022) dimana sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dari indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat disimpulkan untuk Tahun 2022 capaian realisasi dari indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % - 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 69 % - 84 % termasuk kategori baik, rentang 55 % - 68 % adalah berkategori cukup dan 0 s/d < 53 % adalah gagal.

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Tabel 1 Persentase capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	1 Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan	%	62,00	9,5	15,32
II	Menurunnya luas kawasan kumuh	2 Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	30,08	8,84	29,39
III	Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	3 Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	%	100,00	0	0
IV	Meningkatnya tata kelola pertanahan	4 Persentase tanah milik pemerintah daerah yang ditata dan dikelola	%	53,09	30,29	57,05
V	Meningkatnya tata kelola organisasi	5 Indeks kepuasan aparatur	Indeks	2,71	2,71	100



Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 termasuk kategori **sangat baik** dengan nilai capaian sebesar 77,670% karena realisasi dari program atau kegiatan sudah seluruhnya tercapai. Hal ini didukung karena adanya ketersediaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Solok, dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi serta Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **II.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2022 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan - permasalahan serta faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :



1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2022) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 29 orang yang dimana selain terkendala kurangnya personil, juga kurangnya tenaga ahli bidang teknis yang menjabat ataupun mengisi posisi staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid berupa database ataupun Surat Keputusan Kepala Daerah sehingga memperlambat perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan didaerah.
5. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
6. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.
7. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
8. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang.
9. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh dinas maupun oleh masyarakat melalui musrenbang.
10. Sumber daya aparatur yang menjabat belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan - permasalahan dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan

Kementerian/Lembaga dan Propinsi serta telahaan terhadap RTRW Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman yang layak untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid tentang Rumah Tidak Layak Huni (*by name by address*) untuk perencanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
5. Adanya target dari Kementerian PUPR yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak, dimana masih terdapatnya 40 lokasi kawasan kumuh di kabupaten Solok dengan total luas keseluruhan sebesar 412.24 Ha dimana wewenang Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 23 Lokasi dengan total luasan 101.08 Ha (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 653-389-2022 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok).
6. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2022 masih menyisakan 7.674 unit (7.873%) rumah yang tidak layak huni dari total 97.462 unit rumah yang ada di Kabupaten Solok.
7. Adanya target dari SPM perumahan rakyat yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi, yaitu terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sehubungan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur dan keterbatasan anggaran pada tahun sebelumnya.

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 22

sub kegiatan. Untuk Tahun 2022 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sama dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), jadi tidak ada perbedaan antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 Review terhadap rancangan awal RKPD berikut;

#### **II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Terbitnya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrebang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel. 3 berikut :



**TABEL 2**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN SOLOK**

Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rancangan Awal Tahun 2023		Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8
1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	4.231.000.912	100%	4.231.000.912
1 04 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	478.857.960	100%	478.857.960
1 04 01 201 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	156.871.660	4 Dokumen	156.871.660
1 04 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	321.986.300	4 Laporan	321.986.300
1 04 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.844.679.288	100%	2.844.679.288
1 04 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	2.795.148.053	36 Orang/Bulan	2.795.148.053
1 04 01 202 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	49.531.235	2 Laporan	49.531.235
1 04 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	462.620.880	100%	462.620.880
1 04 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Pengkengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan pengkengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	159.400.000	0	159.400.000
1 04 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	8.500.000	10 Paket	8.500.000
1 04 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 Laporan	294.720.880	90 Laporan	294.720.880
1 04 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.332.882	100%	15.332.882
1 04 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000
1 04 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	13.832.882	1 Laporan	13.832.882
1 04 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	429.509.902	100%	429.509.902
1 04 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizannya	16 Unit	273.134.852	16 Unit	273.134.852

1	04	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	156.375.050	1 Unit	156.375.050
1	04	02				Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	100%	490.432.650	100%	490.432.650
1	04	02	2.02			Sosialisasi dan Pelatihan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Persentase nagari yang mendapat sosialisasi	27%	69.396.800	27%	69.396.800
1	04	02	2.02	01		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupatenkota	Orang	69.396.800	Orang	69.396.800
1	04	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	100%	364.292.400	100%	364.292.400
1	04	02	2.03	01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupatenkota yang direhabilitasi	10	253.791.400	10	253.791.400
1	04	02	2.03	04		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupatenkota yang terbangun	5	110.501.000	5	110.501.000
1	04	02	2.06			Penerbitan tzn Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	56.743.450	100%	56.743.450
1	04	02	2.06	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan tzn Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tembraga secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelekat pembangunan rumah untuk penerbitan tzn pembangunan dan pengembangan	15 Dokumen	56.743.450	15 Dokumen	56.743.450
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata	35%	1.121.022.268	35%	1.121.022.268
1	04	03	2.01			Penerbitan tzn Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase tzn bangunan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	20%	224.346.013	20%	224.346.013
1	04	03	2.01	02		Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan atau leview serta legalisasi	1 dokumen	137.950.403	1 dokumen	137.950.403
1	04	03	2.01	03		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	1 Laporan	86.395.610	1 Laporan	86.395.610
1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang tertata	20%	305.781.305	20%	305.781.305
1	04	03	2.02	01		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	18 Dokumen	305.781.305	18 Dokumen	305.781.305
1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	20%	590.894.950	20%	590.894.950
1	04	03	2.03	02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	5 50	590.894.950	5 50	590.894.950



2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	100%	129.280.705	100%	129.280.705
2	10	04	2.01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik-konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	129.280.705	100%	129.280.705
2	10	04	2.01	01		Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129.280.705	1 Dokumen	129.280.705
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	78%	82.736.805	78%	82.736.805
2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang diberikan ganti kerugian	1 persil	82.736.805	1 persil	82.736.805
2	10	05	2.01	02		Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah kab/kota	1 Dokumen	82.736.805	1 Dokumen	82.736.805
2	10	10				PROGRAM PENATAAGUNAN TANAH	Persentase persil tanah yang ditata	92,35%	736.974.844	92,35%	736.974.844
2	10	10	2.10			Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang penggunaannya disertifikatkan dalam satu daerah	50 persil	736.974.844	50 persil	736.974.844
2	10	10	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kab/Kota	50 Dokumen	736.974.844	50 Dokumen	736.974.844



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2020-2024 adalah ***“Kementerian PUPR yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden; Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infratraktur sumber daya air, konektifitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tujuan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktifitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan serta konservasi dan pengurangan resiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerjatinggi.

Adapun lima Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten profesional.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tugas teknis lainnya.

Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan di Kabupaten Solok karena masih sangat terbatasnya personil dan anggaran untuk dapat mengikuti sosialisasi dan pembekalan dari pusat dan pada umumnya personil yang diutus bukan orang yang akan menindaklanjuti pekerjaan.

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD**

Renja merupakan pedoman perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 1 (satu) tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana



Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase Peningkatan Kondisi Perumahan dan Permukiman
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Ditingkatkan
		Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
			Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki
2.	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Persentase Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah
			Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola
3.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Indeks Kepuasan Aparatur

### III.3. Program dan Kegiatan

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Untuk tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan rencananya akan melaksanakan 9 program dengan 20 kegiatan dan 47 sub kegiatan, program - program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



**Tabel 3**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024**

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Non Urusan				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				Rp 9.295.537.747
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 900.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Rp 450.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp 450.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 4.830.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Rp 4.000.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp 400.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	Rp 430.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp 250.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator (Rp.)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Rp 250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Rp 1.780.000.000
	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp 250.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp 450.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Rp 300.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp 430.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp 5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp 21.537.747
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Rp 1.509.000.000



Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	17	Rp 709.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Rp 300.000.000
	Pemeliharaan/Rehab atau Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 500.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 50.000.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Rp 50.000.000
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		Rp 25.000.000
	Pendataan dan Verifikasi Pemertaa Rumah bagi korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Pemertaa Rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		Rp 20.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pendataan Rumah Sewa Milk Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milk Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		Rp 25.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp 660.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersejahterakan		Rp 400.000.000
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 60.000.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		Rp 200.000.000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp 60.000.000
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 25.000.000
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 35.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				Rp 60.000.000
	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Rp 40.000.000



Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penelaahan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rp 20.000.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				Rp 70.000.000
	Fasilitasi Pembenahan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Peleku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Rp 70.000.000
III	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Rp 2.500.000.000
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi		Rp 570.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Rp 48.000.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
					Rp 112.000.000
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Rp 62.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator (Rp.)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peninjauan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		Rp 1.770.000.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		Rp 550.000.000
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Rp 620.000.000
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		Rp 50.000.000
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun		Rp 550.000.000
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIAN KUMUH				
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
					Rp 630.000.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Rp 630.000.000



Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Rp 850.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Rp 800.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Rp 30.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
VI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah KabupatenKota				
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Perantahan dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota		Rp 400.000.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota		Rp 360.000.000
VII	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota				
					Rp 370.000.000
					Rp 370.000.000

Nomor	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 370.000.000
VIII	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 380.000.000
	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan yang Berlaku		Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota		Rp 340.000.000
IX	PROGRAM PENATAAGUAMAN TANAH				
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 650.000.000
	16.795.537.747				



- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## 2. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
  - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
  - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
    - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Pembangunan rumah bagi korban bencana
  - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
    - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
    - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
  - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
    - Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik
3. Program Kawasan Permukiman
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
    - Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
    - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh



- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
    - Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
    - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
    - Perbaiki rumah tidak layak huni
    - Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
    - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
    - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
    - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
- Kegiatan Urusan Penyelenggara PSU Perumahan
    - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
    - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
    - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
  - Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/kota
  
- 8. Program Penetapan Tanah Ulayat
  - Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
  
- 9. Program Penatagunaan Tanah
  - Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :



**TABEL 3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERUMKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERRKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	04			Rp 5.000.000.000		Rp 5.276.000.000
1	04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rp 1.020.000.000		Rp 1.224.000.000
1	04	02		Rp 170.000.000		Rp 204.000.000
1	04	02	2.01			
1	04	02	2.01	01	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000
1	04	02	2.01	03		
1	04	02	2.01	04	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000
1	04	02	2.01	05	Rp 20.000.000	Rp 24.000.000
1	04	02	2.01	06	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Praktikan Maju Tahun 2025				
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Rp	660.000.000	Rp	792.000.000	
1	04	02	2.03	01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana KabupatenKota yang Terhablasi	Rp	400.000.000	Rp	480.000.000
1	04	02	2.03	02 Penyusunan Site Plan darvatau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Site Plan darvatau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana KabupatenKota atau yang Terkena Relokasi Program KabupatenKota	Rp	60.000.000	Rp	72.000.000
1	04	02	2.03	04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota yang Terbangun	Rp	200.000.000	Rp	240.000.000
1	04	02	2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota		Rp	60.000.000	Rp	72.000.000
1	04	02	2.04	01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota atau Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota atau yang Terkena Relokasi Program KabupatenKota	Rp	25.000.000	Rp	30.000.000
1	04	02	2.04	02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota atau Relokasi Program KabupatenKota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana KabupatenKota atau yang Terkena Relokasi Program KabupatenKota	Rp	35.000.000	Rp	42.000.000
1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum darvatau Rumah Khusus		Rp	60.000.000	Rp	72.000.000
1	04	02	2.05	01 Fasilitas Pengelolaan Kelayakan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelayakan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp	40.000.000	Rp	48.000.000
1	04	02	2.05	02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum darvatau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum darvatau Rumah Khusus	Rp	20.000.000	Rp	24.000.000
1	04	02	2.06	Pemerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Rp	70.000.000	Rp	84.000.000







Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Praktisan Maju Tahun 2025				
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	04	03	2.03						
				0,00	Rp	1.770.000.000		Rp	1.945.000.000
1	04	03	2.03	02					
1	04	03	2.03	03					
1	04	03	2.03	07					
1	04	03	2.03	08					
1	04	04							
1	04	04	2.01						
1	04	04	2.01	01					
1	04	05	2.01	02					
1	04	05	2.01	03					

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Praktiran Maju Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		0,00	Rp 2.500.000.000		Rp 2.873.500.000
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		0,00	Rp 760.000.000		Rp 874.000.000
2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	Rp 760.000.000		Rp 874.000.000
2	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp 400.000.000	-	Rp 460.000.000
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp 360.000.000	-	Rp 414.000.000
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		0,00	Rp 370.000.000		Rp 425.000.000
2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	Rp 370.000.000		Rp 425.000.000
2	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		0,00	Rp 720.000.000		Rp 827.000.000
2	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	Rp 720.000.000		Rp 827.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemelehan Balas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemelehan Balas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp 380.000.000	-	Rp 437.000.000
2	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Balas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	-	Rp 340.000.000	-	Rp 390.000.000
2	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH		0,00	Rp 650.000.000		Rp 747.500.000







Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Praktisan Maju Tahun 2025							
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Rp	350.000.000	-	Rp	375.000.000
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Rp	250.000.000	-	Rp	275.000.000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Rp	450.000.000	-	Rp	500.000.000
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Rp	300.000.000	-	Rp	330.000.000
X	XX	01	2.06	11	Dukungan, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Rp	430.000.000	-	Rp	470.000.000
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0,00	Rp	26.537.747		Rp	30.500.000
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp	5.000.000	-	Rp	5.500.000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Rp	21.537.747	-	Rp	25.000.000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	Rp	1.509.000.000		Rp	1.430.000.000
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	-	Rp	709.000.000	-	Rp	550.000.000
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Rp	300.000.000	-	Rp	330.000.000



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2024 diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Disadari bahwa pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.

Pencapaian target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah atau Visi dan Misi Kabupaten Solok.

Arosuka, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**



**DENI PRIHATNI, ST. MT**  
NIP. 19710505 199803 1 017